

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kawasan Laut China Selatan merupakan Kawasan perairan yang dijadikan sebagai pintu gerbang komersil yang krusial bagi sebagian aktivitas besar industri logistik dunia, dan menjadi sub-wilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan Laut China Selatan dipercaya sebagai rute utama perdagangan internasional dengan potensi cadangan sumber daya alam mineral dan persediaan ikan yang melimpah. Menurut sejarah, keberadaan Laut China Selatan telah dimanfaatkan oleh Dinasti Han sejak abad ke-8, dimana Dinasti Han menjadi salah satu poros perdagangan yang melihat potensi di kawasan sebagai jalur pelayaran barang dan jasa serta memicu kemunculan aktor-aktor lainnya (Maksum, 2017).

Letaknya yang strategis ditambah kekayaan alam yang melimpah, Laut China Selatan kerap menjadi objek ajang perebutan dan telah berlangsung sejak lama jauh sebelum adanya negara-bangsa (*nation state*) di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan keberadaan dua gugusan Kepulauan yakni Spratly dan Paracel dianggap penting karena menjadi penanda batasan wilayah negara pengklaim, akses navigasi yang bebas di sekitaran kedua pulau, serta perairan sekitarnya memiliki potensi jumlah ikan banyak yang bisa didapatkan (Emmers, 2010). Akibatnya potensi konflik di wilayah Kawasan terus meningkat dan melibatkan adanya sebutan negara-negara pengklaim kawasan yaitu Tiongkok, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Diantara keenam negara tersebut, Vietnam memiliki posisi yang paling menguntungkan secara geografis dari mana Laut Cina Selatan dapat dipantau atau bahkan dikendalikan.

Posisi Vietnam terhadap Kawasan Laut China Selatan dipercaya sebagai pemilik atas kepulauan Spratly dan Paracel dan telah melakukan berbagai aktivitas sejak lamanya. Hal ini ditemukan awal abad ke-17, dimana Dinasti *Nguyễn* menjadi yang pertama menjalankan fungsi negara atas pulau-pulau tak berpenghuni di Kawasan tersebut menurut dokumen sejarah Vietnam yakni *Đại Nam thực lục*. Beralih pasca Perang Dunia II pun, ketika Vietnam terpaksa mengalami transformasi struktural atas percikan persaingan ideologi dua negara adikuasa yang kemudian menjadikannya terpisah sebagai Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan. Adanya pemisahan menjadi dua negara bagian Vietnam ini turut mempengaruhi sengketa kepulauan Spratly dan Paracel, yakni oleh Vietnam Selatan yang bertanggungjawab atas Kepulauan Paracel di Laut China Selatan karena telah mendudukinya pada awal 1950-an (Jaya, 2015). Sehingga keputusan konferensi Jenewa di IndoCina pada tahun 1954 dan sejak saat itu Vietnam telah menjadi negara pertama yang menginjakkan pangkalan militernya di gugusan kepulauan setelah masa pendudukan Jepang.

Hingga kemudian, kepemilikan Spratly dan Paracel dipertegas dengan adanya yurisdiksi atas zona maritim di Laut Timur Vietnam sebagaimana ditetapkan sesuai dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 Konvensi Hukum Laut. Vietnam bersama dengan Malaysia juga turut menyerahkan Batas Landas Kontinen (CLCS) kepada Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk perpanjangan landas kontinen negara-negara di Laut China Selatan.

Mengetahui hal tersebut berpotensi menjadi penghalang dan Vietnam sebagai ancaman terhadap rencana penguasaan Laut China Selatan, pada tahun 2009 Pemerintah Tiongkok kemudian mengajukan sebuah peta dengan konsep *Nine-dash line* kepada Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertujuan untuk mempatenkan klaim kepemilikan Tiongkok di Kawasan Laut China Selatan. Prinsip dari konsep *Nine-dash line* ini berarti peta teritorial

yang membubuhkan sembilan titik imajiner yang menunjukkan klaim Tiongkok sebesar 90 persen keseluruhan kawasan Laut Cina Selatan. Sehingga Tiongkok bermaksud untuk mengklaim semua pulau yang ada di wilayah termasuk kandungan laut maupun tanah yang ada di bawahnya (Oryza, 2017).

Tiongkok merasa bahwa mereka memiliki hak kepemilikan atas landasan historis dan wilayah pencarian ikan (*effective occupation*) yang dilakukan oleh nenek moyangnya berdasarkan historis negara. Masih dengan alasan historis negara, Tiongkok membenarkan klaimnya dengan menyatakan bahwa mereka adalah negara pertama yang menemukan pulau-pulau di Selatan Laut China, sebagaimana temuan itu terjadi saat Dinasti Xia berkuasa (Kartikasari, 2019). Berdasarkan sejarah panjang kedua negara tersebut, sehingga mereka memiliki peran paling aktif dalam upaya masing-masing menyatakan klaim atas kepemilikan Kepulauan di Kawasan Laut China Selatan, bahkan hampir 50 tahun lamanya.

Tidak hanya kontroversi peta *nine-dash line*, Presiden Hu Jintao pada saat itu tidak berhenti menyuarakan keinginan untuk menjadi Tiongkok negara maritim yang kuat. Bahkan ketika kepemimpinan Tiongkok selanjutnya yakni Presiden Xi Jinping tahun 2013, Tiongkok menjadi semakin agresif dalam domain maritimnya. Beberapa hal yang dilakukan seperti menggencarkan kegiatan reklamasi yang ekspansif, memiliterisasi fitur maritim terdekat yang dikendalikannya, dan mempertajam aktivitas koersifnya di sekitar perairan Kawasan Laut China Selatan (Thu H. L., 2020). Tindakan yang dilakukan Presiden Xi Jinping dipandang Pemerintah Vietnam cukup meresahkan dan mengancam atas kedaulatan Vietnam.

Seperti pada pertengahan 2014, Presiden Xi Jinping memerintahkan untuk mendirikan anjungan minyak di Kepulauan Paracel dengan nama Haiyang Shiyou 981. *China National Offshore Oil Company* (CNOOC) mengirim rig

minyak jauh ke dalam Zona Ekonomi Eksklusif yang diklaim Vietnam. Akibatnya, selama berminggu-minggu kapal Tiongkok dan Vietnam saling beradu satu sama lain secara intens dan berada di ambang kekerasan, meskipun akhirnya terselesaikan dengan CNOOC menarik anjungan minyak mereka.

Di tahun 2018, Agresivitas Tiongkok kembali terjadi dengan adanya kapal survey minyak Haiyang Dizhi 8 dan kapal pengawal milik Tiongkok dikirim untuk mengamati dasar laut di timur laut Vanguard Bank yang merupakan bagian dari kekuasaan Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen Vietnam. Kapal ini melakukan banyak putaran survey minyak dan gas di area seluas 35.000 km² yang mencakup sepuluh blok di timur laut Vanguard Bank. Hal ini memicu kecaman dari Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, Nguyen Quoc Dung, dalam sebuah pidato terbarunya di Singapura dan mengatakan Tiongkok untuk mengekang dan menahan diri atas aktivitas yang mereka lakukan karena sifatnya yang berpotensi mengancam masa depan negara-negara lainnya (mata-matapolitik, 2020).

Dampak dari kejadian tersebut membuat Vietnam harus membatalkan aktivitas pengeboran minyak dua perusahaan internasional yakni Repsol Spanyol dan Mubadala dari Uni Emirat Arab. Vietnam harus membayar dengan total sebesar US\$ 1 Miliar kepada dua perusahaan minyak internasional sebagai ganti rugi dan 'kompensasi' atas aktivitas pengeboran yang sempat dilakukan (Hayton, 2020). Terlebih perusahaan energi Repsol milik Spanyol telah terjadi pembatalan sebanyak dua kali selama tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam berupaya untuk memprioritaskan dan mengelola hubungan dengan Tiongkok di Laut China Selatan, bahkan jika secara bersamaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan melibatkan mitra lain untuk mengimbangi pertumbuhan kekuatan Tiongkok (Grossman, 2018).

Disisi lainnya, contoh agresivitas Tiongkok dalam kegiatan reklamasi ekspansifnya adalah pada tahun 2014 dengan membangun pulau-pulau buatanya di Kepulauan Spratly yang sebagian wilayah kepulauan tersebut merupakan kedaulatan Vietnam. Tiongkok mendirikan pangkalan militer dengan dilengkapi dua bandar udara untuk melayani mobilisasi pesawat-pesawat tempur milik Tiongkok, mendirikan Pelabuhan militer radar dengan frekuensi tinggi, serta membangun kota pariwisata (yang diberikan nama kota Sansha) dan telah memiliki dua wilayah administrasi yaitu Distrik Xisha dan Distrik Nansha pada tahun 2020. Tidak hanya Vietnam namun negara-negara pengklaim lainnya pun telah melancarkan protes terhadap reklamasi yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut China Selatan (Putra, Samekto, & Hardiwinoto, 2016).

Pertumbuhan pesat kekuatan angkatan laut dan kemampuan penegakan hukum maritim di wilayah Laut Cina Selatan merupakan masalah keamanan maritim serius lainnya bagi Vietnam. Tiongkok saat ini diketahui mengeluarkan anggaran belanja pertahanan dalam jumlah besar bahkan berada di posisi kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Perkiraan anggaran belanja pertahanan Tiongkok menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk 2016 adalah melebihi US\$180 Miliar (Ton, 2018). Tak ketinggalan dalam program akuisisi senjatanya, modernisasi Angkatan laut Tiongkok turut mengalami peningkatannya.

Pemerintah Vietnam perlu untuk mengambil peran dalam menghadapi agresivitas yang dilakukan Tiongkok terhadap Kawasan perairan Laut China Selatan. Selain itu, banyak negara lain memandang posisi Vietnam sebagai hal yang penting untuk melawan ekspansionisme maritime dan agresivitas Tiongkok terhadap Laut China Selatan, sehingga perlu untuk melakukan upaya untuk menanganinya. Hal ini kemudian menjadi sebuah topik penelitian untuk membahas terkait langkah-langkah yang diambil Vietnam dalam merespon Tindakan-tindakan agresivitas Tiongkok di Laut

China Selatan. Sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hal tersebut.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disampaikan sehingga rumusan masalah yang kemudian sebagai pertanyaan penelitian yaitu “Bagaimana upaya Pemerintah Vietnam dalam merespon agresivitas Tiongkok terkait diterbitkannya peta *nine-dash line*?”

1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk menjelaskan analisa terhadap permasalahan, maka diperlukan suatu kerangka teoritis. Peneliti kemudian menggunakan konsep *balancing* untuk menganalisis alasan Bagaimana upaya Pemerintah Vietnam dalam merespon agresivitas Tiongkok terkait diterbitkannya peta *nine-dash line*.

1.3.1 Konsep *Balancing* (menyeimbangkan)

Keberadaan sistem internasional yang kerap menjadikannya anarki sehingga memberikan rasa kekhawatiran atau rasa tidak aman bagi negara terutama bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan mendominasi. Negara yang memiliki kekuatan yang besar dapat memberikan pengaruh situasi dilematis dimana negara yang memiliki kekuatan yang minim dapat menjadi ‘mangsa’ dari para ‘predator’ negara kuat. Situasi ini menunjukkan adanya sebuah ketidaksetaraan yang dapat mendatangkan bahaya dalam struktur internasional. Hal ini kemudian mendorong negara-negara untuk menguatkan kekuatannya agar dapat bertahan hidup dalam sistem internasional. Melalui perspektif realisme/neorealisme memberikan preskripsinya yaitu dengan melakukan

upaya penyeimbangan pada kekuatan mereka untuk meminimalisir ancaman yang muncul serta mendapatkan distribusi tambahan kekuatan dari interaksi hubungan dengan negara lain.

Selanjutnya, menurut Schweller terdapat dua strategi, yakni *balancing* dan *bandwagoning*, yang bisa dipilih oleh suatu negara untuk memposisikan dirinya dalam suatu konflik sebagai upaya mempertahankan negara. Namun, kerap terdapat kekeliruan dalam berasumsi bahwa penggunaan antara strategi *bandwagoning* dan *balancing* dianggap perilaku yang berlawanan dengan motivasi tujuan yang sama yaitu untuk mencapai keamanan yang lebih besar. Padahal dalam praktiknya, aktor negara memiliki alasan yang sangat berbeda untuk memilih menggunakan diantara strategi *balancing* dan *bandwagoning*. Hal ini ada kemungkinan disebabkan karena *balancing* lebih umum dikenal dibandingkan dengan strategi *bandwagoning* (Schweller, 2014).

Penjelasan detilnya, strategi *balancing* merupakan upaya mengimbangi kekuatan (negara atau aliansi) pesaing dengan membangun kekuatan internalnya atau aliansi (sebagai kekuatan eksternal) (Montratama & Yani, 2017). Tujuan dari strategi *balancing* adalah untuk pelestarian diri dan perlindungan nilai-nilai yang dimiliki oleh aktor negara. Selain itu, penggunaan strategi *balancing* oleh aktor negara dimaksudkan agar mereka dapat menghindari kerugian yang kemungkinan diperoleh. *Balancing* dalam pemikiran realis menggabungkan pengembangan militer untuk melawan kekuatan yang meningkat di kawasan yang diperdebatkan.

Lebih lanjut, secara definisi tradisional dari *balancing* terutama mengacu pada *power balancing* atau *hard balancing* dalam pengertian militer. *Hard*

balancing merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu negara dalam menyeimbangkan kekuatan lawan adalah dengan membentuk ataupun memperbaharui aliansi militer dan politik mereka. Hal ini bermaksud untuk memperbanyak kuantitas maupun kapabilitas militer negara serta menciptakan hubungan diplomatik yang dapat mendukung berbagai kepentingan keamanan mereka.

Adapun bentuk penyeimbangan lainnya yakni *soft balancing* yaitu upaya penyeimbangan oleh aktor negara secara umum dengan melakukan perjanjian atau kesepakatan militer dalam kurun waktu singkat untuk mengantisipasi potensi ancaman negara lain. Konsep ini berlandaskan atas kerjasama militer yang terbatas, praktik kooperatif secara khusus, juga adanya pembentukan lembaga regional ataupun internasional yang sifatnya sementara. Meskipun demikian, *Soft balancing* dapat berubah menjadi *hard balancing* apabila terjadi persaingan intens yang mempunyai kekuatan besar dan menjadi ancaman (Paul, 2004).

Sedangkan strategi *bandwagoning* merupakan upaya berkompromi dengan kekuatan pesaing untuk menghindari konflik, baik dalam bentuk memenuhi kepentingan pesaing atau menjadi bagian dalam aliansi pesaing (Montratama & Yani, 2017). Strategi ini memprioritaskan dalam upaya memaksimalkan keamanan dengan cara pemihakan atau istilah lainnya adalah “ikut-ikutan”. Tujuan dari strategi *bandwagoning* biasanya adalah perluasan diri atau ekspansi negaranya agar memperoleh suatu keuntungan.

Agresivitas yang terus ditunjukkan oleh Tiongkok terhadap Kawasan Laut China Selatan cukup membuat kewalahan bagi Vietnam dalam menghadapinya. Vietnam terus-menerus menegaskan

klaim kepemilikannya atas Kawasan Laut China Selatan, khususnya dua gugusan Kepulauan Paracels dan Spratly, sebagai bagian dari kedaulatannya. Tindakan Tiongkok ini membuat Vietnam harus lebih waspada dan bersiaga dalam mempertahankan kedaulatannya atas kepemilikan di Kawasan Laut China Selatan. Dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki Vietnam, Pemerintah kemudian perlu untuk mengupayakan cara agar Vietnam dapat menyeimbangi tendensi kekuatan dari agresivitas Tiongkok agar dapat mempertahankan kedaulatannya

1.4 Hipotesa

Upaya Pemerintah Vietnam dalam merespon agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan terkait diterbitkannya peta konsep *nine-dash line* adalah dengan menggunakan perluasan kekuatan *soft balancing* dan *hard balancing*. *Soft balancing* Vietnam adalah berupa upaya diplomasi pertahanan Vietnam dalam mengimbangi tendensi kekuatan dan agresivitas Tiongkok melalui hubungan kerjasama bilateral dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat, India, Jepang, dan Rusia. *Hard balancing* Vietnam adalah berupa upaya Vietnam dalam melakukan modernisasi militer dan kemampuan kekuatan negaranya.

1.5 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian yang berjudul “*Respon Pemerintah Vietnam Terhadap Agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan*”, tujuan diadakannya penelitian ini secara umum untuk mengetahui serta memahami langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam merespon agresivitas Tiongkok setelah adanya peta konsep *nine-dash line* terhadap Kawasan Laut China Selatan.

1.6 Jangkauan Penelitian

Dalam upaya menyelesaikan penelitian ini, Adapun penulis melakukan pembatasan ruang lingkup kajian dengan maksud untuk meminimalisir adanya penyimpangan dari tema atau tujuan yang diinginkan dengan mengambil rentang waktu pada tahun 2014-2020 terhadap bagaimana tindakan maupun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Vietnam dalam merespon agresivitas dari Tiongkok di Laut China Selatan. Hal ini disebabkan pasca insiden anjungan minyak tahun 2014, hubungan kedua negara kemudian mencapai titik terendahnya. Peristiwa anjungan minyak ini sekaligus menjadi awalan perseteruan antara Vietnam dan Tiongkok pasca diterbitkannya peta konsep kontroversial *nine-dash line* tahun 2009. Hingga kemudian di tahun 2015 Presiden Xi Jinping melakukan kunjungan ke Hanoi yang merupakan ibukota Vietnam. Kedua negara sempat mencapai kesepakatan terhadap penyelesaian konflik di Kawasan sengketa, sayangnya bagi Vietnam negara Tiongkok tidak menunjukkan adanya perubahan dan masih kerap menunjukkan agresivitasnya untuk menguasai Laut China Selatan.

1.7 Metode Penelitian

Adapun penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data maupun informasi yang aktual berkaitan judul penelitian. Selanjutnya, untuk melengkapi data yakni dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) melalui data sekunder yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang dipublikasikan seperti buku, jurnal, media cetak, situs internet, dan laporan dari berbagai sumber yang relevan dengan hasil penelitian yang disusun.

1.8 Sistematika Penelitian

Adapun susunan sistematika penulisan dari tulisan ini terdiri dari empat Bab utama dengan pembagian:

BAB I, membahas terkait pendahuluan yang disertai sub-poin yakni latar belakang permasalahan, rumuan masalah, kerangka pemikiran yang digunakan, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, jangkauan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II, akan membahas mengenai perkembangan konflik Laut China Selatan dari perspektif Vietnam dan Tiongkok.

BAB III, akan membahas tentang bagaimana respon Pemerintah Vietnam dalam menghadapi agresivitas Tiongkok di Laut China Selatan

BAB IV, akan membahas bagian penutup yakni kesimpulan yang didapatkan dari analisis dan pembahasan fenomena dari penelitian yang dilakukan.